



MANAJEMEN KRISIS DALAM KEBIJAKAN FISKAL: ANALISIS KOMENTAR YOUTUBE TERHADAP WACANA PEMOTONGAN ANGGARAN ASN

Novi Satria Jatmiko ^{*1}

Mardatillah¹

¹ STIE Madani Balikpapan, Balikpapan, Indonesia

ABSTRACT

This study analyzes public opinion regarding the State Civil Apparatus (ASN) budget reduction policy in the Prabowo administration. This study uses a qualitative content analysis method by examining comments on the YouTube video "ASN Will Suffer If Many Budgets Are Cut in the Prabowo Administration" using NVivo 12 Pro software. The results of the study show that the majority of comments have negative sentiments. The main concerns include ASN welfare, economic stability, and the decline in the quality of public services. The public also demands transparency and fairness in policies, pushing for budget reduction not only to ASN but also high-ranking officials and the DPR. This study confirms that social media, especially YouTube, plays a role as an advocacy space that shapes public perception of fiscal policy. Therefore, a more transparent, data-based, and participatory crisis management strategy is needed to reduce public resistance to controversial policies.

Keywords: Crisis Management, Public Opinion, YouTube, Budget Reduction

RIWAYAT ARTIKEL

Tanggal Masuk:
27-03-2025
Tanggal Diterima:
18-06-2025
Tersedia Online:
22-06-2025

*Korespondensi:
Novi Satria Jatmiko

E-mail: novi.satria@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis opini publik terkait kebijakan pemotongan anggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan Prabowo. Studi ini menggunakan metode analisis konten kualitatif dengan mengkaji komentar pada video YouTube "ASN Akan Menderita Jika Banyak Anggaran yang Dipotong di Pemerintahan Prabowo" menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Pro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas komentar memiliki sentimen negatif. Kekhawatiran utama mencakup kesejahteraan ASN, stabilitas ekonomi, dan penurunan kualitas layanan publik. Publik juga menuntut transparansi dan keadilan dalam kebijakan, dengan dorongan agar pemangkasan anggaran tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga pejabat tinggi dan DPR. Penelitian ini menegaskan bahwa media sosial, khususnya YouTube, berperan sebagai ruang advokasi yang membentuk persepsi publik terhadap kebijakan fiskal. Oleh karena itu, strategi manajemen krisis yang lebih transparan, berbasis data, dan partisipatif diperlukan untuk mengurangi resistensi masyarakat terhadap kebijakan kontroversial.

Keywords: Manajemen Krisis, Opini Publik, YouTube, Pemotongan Anggaran

Pendahuluan

Krisis ekonomi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal memainkan peran signifikan dalam menentukan kestabilan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, krisis global tahun 2008 berakar dari kegagalan sistem keuangan, mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, termasuk di Indonesia (Zainuri et al., 2022). Krisis ini berdampak besar terhadap negara-negara maju dan berkembang, menunjukkan betapa meluasnya krisis tersebut dalam skala global (Hidayat & Hardianto, 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemerintah melakukan peningkatan belanja perlindungan sosial selama pandemi, mencakup peningkatan pengeluaran untuk kesehatan dan sektor-sektor lainnya guna mendukung masyarakat yang terdampak (Hadiyanto et al., 2022). Sementara itu, selama masa pemangkasan anggaran, terdapat kecenderungan untuk mengurangi anggaran pelatihan dan pengembangan (Elliott, 2020). Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa penurunan prosociality dalam konteks rekrutmen dan manajemen SDM di sektor publik dapat mengurangi kinerja pelayanan publik (Ashraf et al., 2020).

Pemotongan anggaran ini menjadi perdebatan yang tidak hanya berfokus pada pemotongan, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dapat digunakan untuk memaksimalkan keberlanjutan ekonomi dalam situasi krisis. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menunjukkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran dalam berbagai situasi, terutama saat pemilihan umum, menunjukkan bahwa pengelolaan yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik (Tarina et al., 2024). Dalam konteks ini, pengawasan terhadap pengeluaran anggaran menjadi aspek kunci untuk memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara efektif dan efisien (Santoso et al., 2023).

Salah satu isu yang saat ini menarik perhatian publik adalah wacana mengenai pemotongan anggaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Isu ini memicu reaksi luas di ruang digital, di mana publik menyampaikan pandangan dan kekhawatiran mereka melalui berbagai platform media sosial. Dalam konteks ini, aktivisme online mulai berkembang sebagai bentuk ekspresi politik digital yang menyoroti isu-isu kesejahteraan ASN. Menurut Greijdanus et al. (2020), aktivisme online dapat meningkatkan visibilitas suatu isu dan mempercepat mobilisasi dukungan terhadap suatu gerakan, baik dalam bentuk protes daring maupun luring (Nirmalasari, 2020).

Gap Penelitian (Research Gap) pada penelitian ini adalah masih minimnya kajian tentang Manajemen Krisis dalam Konteks Pemotongan Anggaran ASN, terdapat gap yang perlu diisi dalam konteks analisis komentar di media sosial, khususnya YouTube (Irmayani, 2024; Misrun et al., 2023). Selain itu, masih belum banyak penelitian yang menghubungkan media sosial dan Kebijakan Publik melalui analisis sentimen. Kajian tentang interaksi media sosial dan kebijakan pemerintah sering kali hanya berfokus pada aspek komunikasi politik atau perdebatan di media sosial (Dwina & Lexianingrum, 2024; Nirmalasari, 2020). Studi ini mengisi gap tersebut dengan menganalisis sentimen publik terhadap kebijakan fiskal menggunakan data komentar di YouTube, mencerminkan opini publik secara lebih spontan dan organik. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menggali bagaimana YouTube sebagai salah satu media sosial terbesar dapat membentuk wacana publik terhadap kebijakan pemerintah.

Kebaruan (Novelty) penelitian ini adalah pendekatan Manajemen Krisis dalam Wacana Pemotongan Anggaran ASN. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menggunakan Teori Manajemen Krisis untuk menganalisis bagaimana masyarakat merespons kebijakan pemotongan anggaran ASN sehingga pemerintah dapat memberikan masukan dalam

menyusun kebijakan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan. Penelitian ini memanfaatkan Komentar YouTube sebagai indikator sentimen publik dalam Kebijakan Publik, memperkenalkan YouTube sebagai sumber data alternatif untuk memahami bagaimana masyarakat merespons kebijakan pemerintah secara langsung dan terbuka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana masyarakat merespons wacana pemotongan anggaran ASN di media sosial, khususnya YouTube, dengan menggunakan pendekatan manajemen krisis, serta mengidentifikasi pola opini publik dan implikasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam merespons krisis fiskal secara lebih partisipatif dan transparan.

Penelitian ini juga relevan dalam konteks pengelolaan dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Timur. Sebagai salah satu provinsi yang menjadi pusat transformasi pembangunan nasional, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam reformasi birokrasi dan efisiensi fiskal. Kebijakan pemotongan anggaran ASN berpotensi langsung memengaruhi kinerja, motivasi, serta kesejahteraan ASN yang merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan di daerah.

Dengan menganalisis opini publik terhadap isu pemotongan anggaran ASN, penelitian ini memberikan gambaran bagaimana kebijakan fiskal nasional dapat berdampak pada kualitas layanan publik dan stabilitas birokrasi di tingkat daerah, termasuk di Kalimantan Timur. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan SDM yang lebih adaptif, adil, dan responsif terhadap dinamika fiskal nasional.

Literature Review

Konsep Dasar Manajemen Krisis

Manajemen krisis berfokus pada strategi menghadapi situasi darurat yang mengancam stabilitas organisasi atau negara. [Mahfudz \(2025\)](#) menekankan bahwa selain berdampak ekonomi, krisis juga memengaruhi stabilitas sosial dan politik. Dalam kebijakan publik, manajemen krisis mencakup pemangkasan anggaran, restrukturisasi birokrasi, dan reformasi fiskal [Mahfudz \(2025\)](#).

Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menerapkan pendekatan manajerial yang inklusif dan responsif dalam menghadapi berbagai krisis ([Yaşar Dinçer et al., 2024](#)). Pengalaman kasus di Barcelona setelah serangan teroris menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai strategi komunikasi publik dalam mengatasi krisis, mengedepankan transparansi dan keterbukaan ([Cristòfol et al., 2020](#)).

Menurut Coombs (2007), manajemen krisis bukan hanya sekadar satu peristiwa tunggal, melainkan terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: (1) pra-krisis, (2) respons krisis, dan (3) pasca-krisis. Tahap pra-krisis berfokus pada upaya persiapan dan pencegahan. Selanjutnya, tahap respons krisis merupakan fase di mana organisasi merespons situasi krisis yang terjadi dan tahap pasca-krisis berperan dalam menyusun strategi yang lebih menyeluruh sebagai langkah antisipatif menghadapi kemungkinan krisis di masa mendatang ([Nirmalasari, 2020](#)).

Pemangkasan Anggaran sebagai Strategi Manajemen Krisis

Pemangkasan anggaran menjadi strategi umum pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi. [Mansur \(2021\)](#) menyebutkan bahwa pemerintah daerah merespons pandemi dengan refocusing anggaran. [Astiti \(2020\)](#) menambahkan bahwa anggaran APBN diprioritaskan

untuk sektor esensial, sementara program yang tidak mendesak dikurangi. Namun demikian, pemangkasan anggaran dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan di sektor lain yang tidak kalah penting, sehingga menciptakan tantangan baru dalam pelaksanaan kebijakan publik (Hadna, 2019).

Strategi pemangkasan anggaran dilakukan untuk menjaga keberlanjutan operasional dan efisiensi anggaran, meskipun terkadang hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam mempertahankan kualitas pelayanan dan output organisasi (Sumartono & Wahid, 2021).

Dalam konteks pemerintah daerah, pemangkasan anggaran juga tampak sebagai respons yang strategis. Lebih lanjut, manajemen anggaran yang baik dalam institusi kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan efisiensi penggunaan dana, terutama dalam situasi krisis (Turnip & Soewondo, 2022).

Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap ASN dan Manajemen Sumber Daya Manusia

Anggaran yang berkurang dapat memperbesar nilai serapan anggaran, tetapi juga dapat menghambat pengembangan kompetensi pegawai. Oleh karena itu, pengurangan anggaran harus diimbangi dengan strategi yang mempertimbangkan peningkatan kinerja dan profesionalisme ASN. Manajemen yang baik meliputi penyusunan anggaran yang jelas, penguatan komitmen organisasi, dan peningkatan komunikasi di dalam lembaga pemerintahan (Wijayanti & Rahmawati, 2020).

Transparansi Anggaran dan Isu Korupsi dalam Konteks Manajemen Krisis

Di lingkungan yang tidak mendukung, meskipun ada kebijakan yang baik, praktik korupsi masih bisa terjadi. Transparansi sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam satuan kerja pemerintahan, yang menunjukkan bahwa ketika pegawai merasa bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, kinerja mereka cenderung meningkat (Putra et al., 2023).

Penelitian Menggunakan Komentar di Youtube

Analisis komentar YouTube membantu menggali persepsi publik secara luas. Analisis komentar efektif dalam konteks transparansi dan akuntabilitas. Tanggapan langsung dari masyarakat mengenai isu anggaran dan pengelolaannya, membantu untuk lebih memahami penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam hal transparansi (Bakhtiar et al., 2023). Namun, menggunakan komentar sebagai sumber data juga mengandung tantangan. Faktor-faktor seperti tekanan anggaran dapat mempengaruhi perilaku dalam konteks akuntansi dan kualitas audit, mengindikasikan adanya latar belakang yang kompleks dalam menginterpretasi umpan balik publik yang tercermin dalam komentar (Dewi & Jayanti, 2021).

Penelitian Terdahulu

Misrun (2023) menganalisis sentimen komentar YouTube terkait Anies Baswedan menggunakan Naïve Bayes Classifier. Dari 1.009 komentar, 610 bersentimen positif dan 399 negatif, dengan akurasi model 78% (Misrun et al., 2023). Irmayani (2024) menganalisis sentimen publik terhadap kenaikan PPN 12% menggunakan model BERT. Mayoritas komentar bersentimen negatif, menunjukkan pentingnya memahami persepsi publik melalui YouTube (Irmayani, 2024).

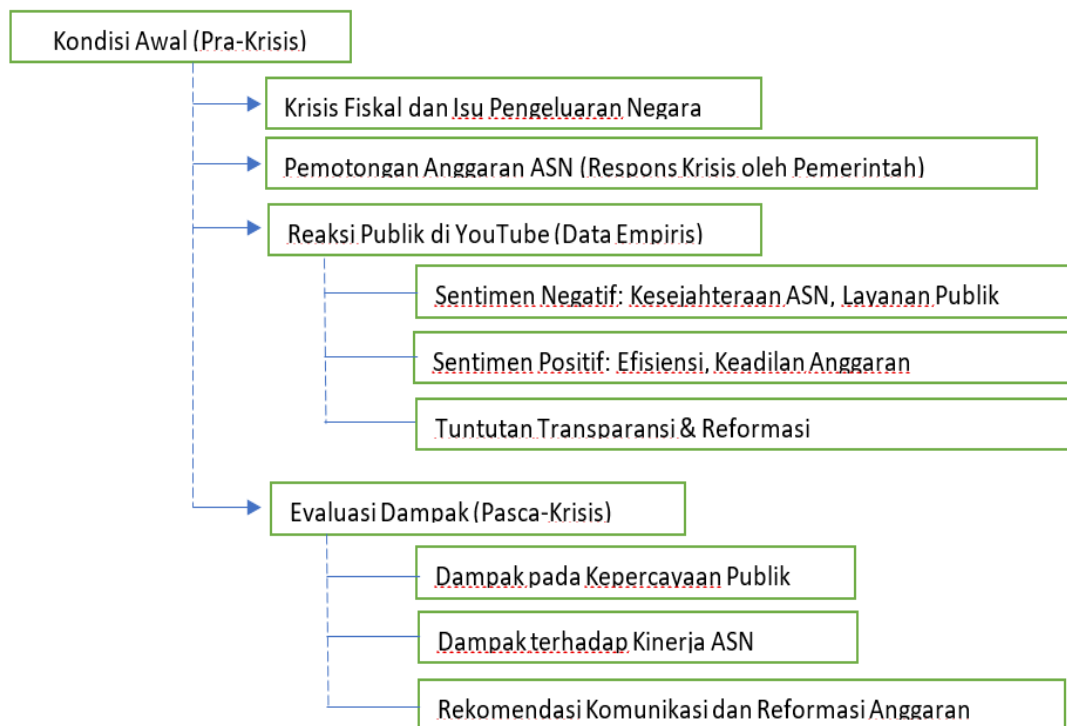
Sentimen komentar YouTube terkait kebijakan BPJS menggunakan Naïve Bayes menyatakan bahwa dari 2.968 komentar, 45,9% bersentimen positif, menunjukkan dukungan

terhadap kebijakan baru (Taufik Sugandi et al., 2024). Dwina & Lexianingrum (2024) meneliti komunikasi politik di YouTube terkait pembangunan IKN. Video pro-IKN menyoroti manfaat ekonomi, sementara video kontra fokus pada dampak lingkungan dan pendanaan. YouTube berperan sebagai alat komunikasi politik yang efektif (Dwina & Lexianingrum, 2024).

Data dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis komentar untuk mengkaji wacana yang berkembang di media sosial terkait kebijakan pemotongan anggaran ASN dalam pemerintahan Presiden Prabowo.

Penelitian ini dibangun di atas kerangka teori manajemen krisis dari Coombs (2007), yang membagi krisis ke dalam tiga tahapan utama: pra-krisis, respons krisis, dan pasca-krisis. Dalam konteks kebijakan pemotongan anggaran ASN, tahap pra-krisis ditandai dengan krisis fiskal dan tekanan pengeluaran negara. Respons krisis terwujud dalam kebijakan pemangkasan anggaran ASN, yang kemudian memunculkan reaksi publik melalui media sosial, terutama YouTube. Tahap pasca-krisis mencakup dampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik, motivasi ASN, dan efektivitas kebijakan fiskal itu sendiri.



Gambar 1: Kerangka Berpikir Penelitian

Komentar-komentar publik yang dianalisis mencerminkan persepsi, resistensi, atau dukungan terhadap kebijakan tersebut. Dengan memanfaatkan data digital dari YouTube, penelitian ini menghubungkan persepsi publik dengan strategi komunikasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan fiskal. Kerangka berpikir ini menggabungkan dimensi kebijakan fiskal, manajemen krisis, dan opini publik digital untuk mengevaluasi dinamika respons masyarakat terhadap kebijakan yang kontroversial

Data yang digunakan terdiri dari komentar di platform youtube yang sedang hangat membahas isu ini. Sumber Data primer diperoleh melalui pengumpulan unggahan komentar di video youtube dengan judul "ASN Akan Menderita Jika Banyak Anggaran yang Dipotong di

Pemerintahan Prabowo”. Video ini diunggah di kanal youtube Metro TV, dan saat dilakukan pengambilan data pada tanggal 29 Januari sudah mendapatkan 659 komentar. Komentar-komentar tersebut memiliki beberapa kata kunci yang kemudian di coding kan menggunakan software NVivo 12 Pro. Metode analisis data dilakukan dengan teknik analisis, mengidentifikasi pola narasi yang berkembang, sentimen publik, serta strategi komunikasi yang digunakan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat.

Batasan Penelitian terbatas pada analisis wacana yang berkembang di komentar video youtube tersebut. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada diskusi yang terjadi dalam rentang waktu dilakukannya penelitian ini sehingga tidak mencerminkan keseluruhan opini publik yang dapat berkembang di masa mendatang. Rancangan penelitian dilakukan melalui 6 tahapan yang dimulai dari menentukan topik penelitian, menentukan rumusan masalah, kajian literatur, pengumpulan data, analisis data, serta penarikan Kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis Word Frequency Query dan Word Cloud

Word Frequency Query menunjukkan pola kata yang dominan dalam Komentar YouTube dengan angka, semakin banyak dibicarakan maka angkanya semakin besar. Sedangkan Word Cloud merepresentasikan visual pola kata, semakin kata tersebut sering dibicarakan maka semakin besar visual yang terbentuk.

Tabel 1: Word Frequency Query

No	Kata	Panjang	Jumlah	%	No	Kata	Panjang	Jumlah	%
1	Asn	3	682	1.61	11	Aja	3	206	0.79
2	Yg	2	466	1.78	12	Ada	3	180	0.69
3	Di	2	406	1.55	13	Ini	3	176	0.67
4	Menderita	9	378	1.44	14	Bisa	4	160	0.61
5	Rakyat	6	320	1.22	15	Gak	3	158	0.60
6	Dan	3	316	1.21	16	Tidak	5	156	0.60
7	Yang	4	288	1.10	17	Ga	2	152	0.58
8	Anggaran	8	260	0.99	18	Banyak	6	148	0.57
9	Itu	3	258	0.99	19	Jadi	4	128	0.49
10	Gaji	4	242	0.92	20	Kata lainnya		19.329	76.83

Sumber : data diolah, 2025

Hasil Word Frequency Query dan Word Cloud menunjukkan bahwa kata “ASN”, “menderita”, “rakyat”, “anggaran”, dan “gaji” paling sering muncul, menandakan bahwa diskusi publik berpusat pada dampak pemotongan anggaran terhadap kesejahteraan ASN dan ekonomi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh [Hadiyanto et al., \(2022\)](#), yang menyatakan bahwa pemotongan anggaran dalam situasi krisis ekonomi sering kali berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai negeri dan efektivitas layanan publik. Hal ini juga sejalan dengan temuan penelitian oleh [Nirmalasari, 2020](#)), yang menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai alat advokasi dalam meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.



Kemunculan kata “menderita” dalam jumlah yang tinggi berikutnya menunjukkan bahwa sebagian besar komentar memandang kebijakan pemotongan anggaran ini sebagai sesuatu yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan ASN. Hal ini juga mengindikasikan adanya perasaan ketidakpuasan atau keresahan di kalangan ASN dan masyarakat umum terhadap pemotongan anggaran tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian [Elliott \(2020\)](#) yang menyoroti bahwa pemangkasan anggaran sering kali mengurangi investasi pada pelatihan dan pengembangan pegawai, yang dapat berdampak pada penurunan kinerja dan kepuasan kerja mereka.

Kata “rakyat” yang muncul cukup sering mengindikasikan bahwa diskusi mengenai pemotongan anggaran tidak hanya terbatas pada ASN, tetapi juga bagaimana masyarakat umum merespons kebijakan ini. Hal ini menunjukkan adanya dua perspektif utama dalam wacana publik, yaitu kelompok yang mendukung pemangkasan anggaran sebagai langkah efisiensi, dan kelompok yang khawatir akan dampak negatifnya terhadap kesejahteraan ASN serta kualitas pelayanan publik. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa publik tidak hanya memandang isu ini sebagai persoalan yang menyangkut ASN semata, tetapi juga sebagai kebijakan yang berdampak lebih luas pada masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh [Tarina et al. \(2024\)](#) bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal.

Kata “dipotong”, “uang”, “kerja”, dan “negara” sering muncul dalam konteks percakapan, yang menandakan bahwa banyak orang membicarakan bagaimana pemotongan anggaran ASN dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian dari [Hidayat & Hardianto \(2022\)](#) yang menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang tidak tepat sasaran dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan memperdalam dampak krisis ekonomi terhadap kelompok tertentu.

Analisis Tree Map

Tree Map mengelompokkan komentar menjadi empat kategori utama, yaitu (1) dukungan terhadap pemangkasan anggaran karena ASN dianggap menerima tunjangan berlebih, (2) kritik terhadap dampaknya pada kesejahteraan ASN dan layanan publik, (3) tuntutan transparansi agar pemangkasan juga berlaku bagi pejabat dan DPR, serta (4) kekhawatiran terhadap dampak ekonomi yang lebih luas.

Kategori pertama, kata seperti *"adil"*, *"pns"*, *"setuju"*, dan *"efisiensi"* menunjukkan komentar yang mendukung kebijakan pemotongan anggaran ASN. Ini menunjukkan bahwa

sebagian masyarakat mendukung kebijakan ini karena dianggap sebagai langkah efisiensi fiskal yang diperlukan untuk mengurangi pemborosan. Banyak komentar dalam kategori ini yang menyatakan bahwa ASN selama ini mendapatkan banyak fasilitas dan tunjangan yang tidak dimiliki oleh pekerja swasta, sehingga pemotongan anggaran dianggap sebagai sesuatu yang adil. Beberapa komentar juga menyebut bahwa pemotongan anggaran ASN harus diarahkan pada pengurangan anggaran perjalanan dinas dan seminar, yang sering dianggap sebagai bentuk pemborosan dalam birokrasi.

asn	menderita	anggaran	ada	banyak	dari	nya	saja	sudah	ya	pns	setuju
					mau	bukan	saya	dinas	hanya	jangan	karena uang
			ini	jadi							
	rakyat	itu			negara	kalau	semua	cuma	harus	lagi	maka pejabat biar
yg			bisa	pak		kalo	korupsi	pangk	perjalaklo	presidutk	21
					kerja						
	dan	gaji	gak	juga		tunjangan	selama	prabow	20	sanga	17 tapi 19
					potong			udah	23	16	kami rapat cari
			tidak	lebih		untuk	dpr				
di					dipotong			kok	akan	deng	duit pajak punya
	yang	aaja				buat	kan				cukup orang pentir
			ga	ke	mereka			hidup	kita	lah	dulu sampeswast
						masih	apa	indone	sama	daer	masy seperti tau

Gambar 3: Tree Map

Kategori kedua, kata seperti “kerja”, “kinerja”, “motivasi”, dan “tidak” mencerminkan ketidakpuasan ASN terhadap kebijakan ini, menunjukkan kritik terhadap kebijakan pemotongan. Banyak orang yang merasa bahwa pemangkasan anggaran ASN akan berdampak negatif terhadap kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri. Beberapa ASN yang berkomentar menyatakan bahwa pemotongan anggaran akan mengurangi motivasi kerja mereka, terutama jika kebijakan ini tidak diimbangi dengan strategi peningkatan efisiensi birokrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian [Ashraf et al. \(2020\)](#) yang menunjukkan bahwa pengurangan anggaran di sektor publik dapat berdampak pada penurunan motivasi dan produktivitas pegawai negeri.

Kategori ketiga, kata seperti “pejabat”, “korupsi”, “dpr”, “duit”, dan “presiden” mengindikasikan bahwa masyarakat ingin pemotongan juga diterapkan kepada pejabat negara. Adanya tuntutan transparansi dan pemangkasan anggaran pejabat yang menunjukkan bahwa banyak masyarakat meminta agar pemotongan anggaran tidak hanya diterapkan pada ASN, tetapi juga pada pejabat tinggi dan DPR. Banyak komentar yang menyatakan bahwa selama ini anggaran negara lebih banyak dinikmati oleh elite politik, sehingga pemangkasan seharusnya dilakukan secara lebih adil dengan menyasar semua kelompok yang mendapatkan anggaran dari APBN.

Kategori keempat, kata seperti “Indonesia”, “ekonomi”, “pengaruh”, dan “transportasi” menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap dampak pemotongan anggaran terhadap sektor lain atau dampak terhadap ekonomi makro, dimana beberapa komentar menyoroti bagaimana pemotongan anggaran ASN dapat berdampak negatif terhadap sektor ekonomi lainnya, seperti industri perhotelan, transportasi, dan jasa yang bergantung pada perjalanan dinas ASN. Hal ini sesuai dengan penelitian [Astiti \(2020\)](#) yang menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran

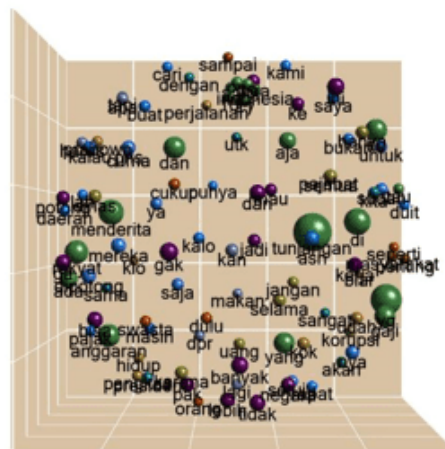
yang terlalu besar dapat mengganggu keberlangsungan sektor-sektor ekonomi tertentu yang bergantung pada belanja pemerintah.

Analisis Cluster 3D

Cluster 3D menunjukkan bahwa publik menghubungkan pemotongan anggaran dengan penurunan gaji dan kesejahteraan ASN, menandakan kekhawatiran terhadap dampak kebijakan ini. Hubungan antara kata “ASN” dan “menderita” menunjukkan bahwa banyak komentator berpendapat bahwa pemangkasan anggaran ASN akan menurunkan standar hidup pegawai negeri, terutama bagi mereka yang bergantung sepenuhnya pada gaji dan tunjangan dari pemerintah.

Selain itu, ada kluster lain yang menghubungkan kata “korupsi”, “pejabat”, dan “anggaran”, yang menunjukkan bahwa banyak masyarakat melihat pemangkasan anggaran ASN sebagai bagian dari perdebatan yang lebih luas tentang efisiensi keuangan negara dan upaya pengurangan korupsi dalam birokrasi. Beberapa komentar mengekspresikan kecurigaan bahwa anggaran yang dipotong dari ASN mungkin tidak benar-benar digunakan untuk efisiensi fiskal, melainkan tetap mengalir ke kelompok elite politik melalui mekanisme yang kurang transparan.

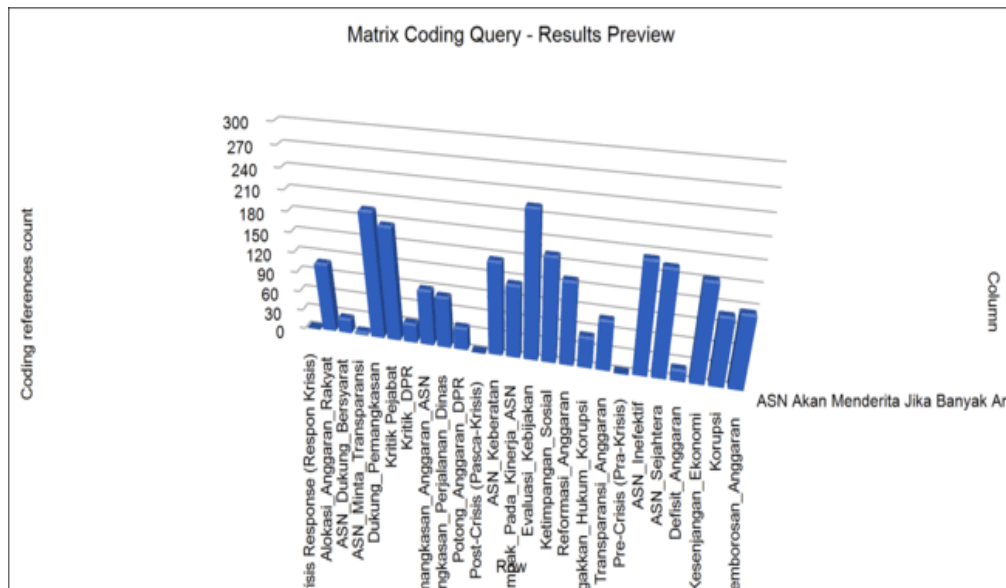
Penelitian Santoso et al. (2023) menyoroti bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran publik sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini dilakukan secara adil dan disertai dengan pelaporan keuangan yang transparan agar tidak memicu ketidakpercayaan lebih lanjut (Santoso et al., 2023).



Gambar 4: Cluster 3D

Analisis Matrix Coding Query dan Node Matrix Coding Query

Analisis Matrix Coding Query pada gambar 5 menunjukkan jumlah referensi pengkodean (*coding references count*) untuk berbagai tema yang muncul dalam komentar di YouTube terkait pemotongan anggaran ASN. Beberapa tema utama dengan jumlah referensi tinggi meliputi “ASN Keberatan”, “Kritik ASN”, “Transparansi Anggaran”, “Kritik Pejabat”, “Kritik DPR”, “ASN Dukung Bersyarat”. Adanya hubungan erat antara “Kritik Pejabat”, “Kritik DPR”, dan “Pemangkasan Anggaran ASN” menunjukkan bahwa banyak opini publik yang menilai bahwa kebijakan pemangkasan anggaran ASN dilakukan secara tidak adil, karena pemangkasan ini hanya menyasar ASN tanpa adanya pemangkasan anggaran yang signifikan bagi pejabat tinggi dan DPR.



Gambar 5: Matrix Coding Query

Publik menilai kebijakan ini tidak adil karena pemotongan lebih banyak menyasar ASN, sementara anggaran besar untuk pejabat dan DPR tetap dipertahankan. Menurut Buchanan & Wagner (1977) dalam Public Choice Theory, kebijakan fiskal sering kali mendapatkan perlawanan ketika masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut tidak dilakukan secara adil (Mansur, 2021).

Dalam konteks kebijakan pemangkasan anggaran ASN, publik merasa bahwa pemotongan ini seharusnya tidak hanya diterapkan pada ASN, tetapi juga pada sektor lain yang memiliki anggaran lebih besar, seperti pejabat negara dan DPR. Jika kebijakan ini diterapkan tanpa adanya distribusi pemotongan anggaran yang adil, maka kebijakan ini akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan memperburuk persepsi publik terhadap kebijakan fiskal yang diterapkan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Turnip & Soewondo (2022) yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang hanya menargetkan satu kelompok tertentu sering kali menimbulkan ketidakpuasan sosial dan meningkatkan distrust terhadap pemerintah.

Keterkaitan antara "ASN Keberatan", "Kritik ASN", dan "Transparansi Anggaran" tampak cukup erat mengindikasikan bahwa banyak ASN merasa dirugikan dan meminta transparansi dalam kebijakan ini. Hal ini sejalan dengan penelitian Hadiyanto et al. (2022) yang menunjukkan bahwa ASN cenderung lebih menerima kebijakan efisiensi fiskal jika ada jaminan transparansi dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara "ASN Dukung Bersyarat", "ASN Minta Transparansi", dan "Reformasi Anggaran". Ini menunjukkan bahwa tidak semua ASN menolak kebijakan pemotongan anggaran. Namun, mereka memberikan dukungan bersyarat, dengan syarat bahwa kebijakan ini dilakukan secara adil, transparan, dan diiringi dengan reformasi sistem anggaran secara menyeluruh. Banyak ASN yang setuju dengan gagasan efisiensi anggaran, tetapi mereka menekankan bahwa pemotongan anggaran ASN tidak boleh dilakukan tanpa perbaikan dalam pengelolaan anggaran negara secara lebih luas.

Hasil Matrix Coding Query juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara "Tegakkan Hukum Korupsi", "Transparansi Anggaran", dan "Evaluasi Kebijakan". Publik menilai bahwa kebijakan pemangkasan anggaran ASN tidak akan efektif jika tidak disertai dengan upaya serius dalam menegakkan hukum terhadap kasus korupsi. Banyak komentar di YouTube

yang menyatakan bahwa defisit anggaran negara lebih banyak disebabkan oleh kebocoran anggaran akibat korupsi, bukan karena tingginya belanja pegawai. Jika kebijakan ini diterapkan tanpa adanya transparansi dan evaluasi kebijakan yang jelas, maka masyarakat akan semakin skeptis terhadap efektivitas kebijakan ini. Menurut [Santoso et al. \(2023\)](#), transparansi dalam pengelolaan anggaran memiliki korelasi langsung dengan tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah.

Analisis Project Map

Project Map adalah alat visualisasi yang memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antar elemen dalam proyek penelitian secara sistematis. Project Map digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kategori utama dalam penelitian, termasuk hubungan antara tema (nodes), data yang dikodekan, serta kategori yang berkaitan dalam proses analisis.



Gambar 6: Project Map

Tahap Pra-Krisis:

Project Map tahap pra-krisis menunjukkan bahwa keputusan pemotongan anggaran ASN dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik seperti “ASN Inefektif”, “ASN Sejahtera”, “Defisit Anggaran”, “Kesenjangan Ekonomi”, “Korupsi”, dan “Pemborosan Anggaran”. Publik menilai ASN kurang produktif namun tetap menikmati kesejahteraan tinggi, sementara pemborosan birokrasi dan korupsi dianggap turut memperbesar defisit negara. Meskipun faktor-faktor ini mendorong pemangkasan anggaran, masyarakat mempertanyakan mengapa kebijakan hanya menyasar ASN, bukan pejabat atau DPR yang juga dinilai boros.

Tahap Crisis Response:

Respon publik terhadap kebijakan ini terbagi dalam beberapa kategori, seperti dukungan bersyarat, kritik terhadap pejabat dan DPR, serta tuntutan transparansi. “ASN Dukung Bersyarat” dan “ASN Minta Transparansi” mencerminkan sikap ASN yang bersedia menerima pemangkasan jika disertai kejelasan dan reformasi anggaran (Ashraf et al., 2020). Sementara itu, “Dukung Pemangkasan”, “Kritik Pejabat”, dan “Kritik DPR” menunjukkan polarisasi antara yang mendukung efisiensi fiskal dan yang menilai kebijakan ini tidak adil karena hanya menyasar ASN (Turnip & Soewondo, 2022; Mansur, 2021). Kritik juga diarahkan pada ketimpangan pemangkasan, terutama terkait perjalanan dinas pejabat (Santoso et al., 2023). Project Map tahap respons krisis menggambarkan keragaman reaksi yang menuntut transparansi, reformasi menyeluruh, dan distribusi anggaran yang adil.

Tahap Post-Crisis:

Project Map tahap pasca-krisis menunjukkan dampak jangka panjang kebijakan pemotongan anggaran ASN terhadap motivasi kerja, ketimpangan sosial, dan stabilitas fiskal. “Dampak Pada Kinerja ASN” dan “ASN Keberatan” menyoroti penurunan motivasi akibat kebijakan yang dinilai mengabaikan kesejahteraan (Tarina et al., 2024). Sementara itu, “Evaluasi Kebijakan” dan “Reformasi Anggaran” menegaskan perlunya peninjauan atas efektivitas kebijakan dalam mengurangi defisit (Santoso et al., 2023). Publik juga mengaitkan “Ketimpangan Sosial” dengan tuntutan “Tegakkan Hukum Korupsi”, menganggap pemberantasan korupsi lebih tepat sebagai solusi fiskal (Turnip & Soewondo, 2022). Secara keseluruhan, perdebatan dipengaruhi oleh isu transparansi, keadilan anggaran, dan integritas hukum. Jika tidak ditangani dengan baik, kebijakan ini dapat menggerus kepercayaan publik dan memperburuk stabilitas ekonomi.

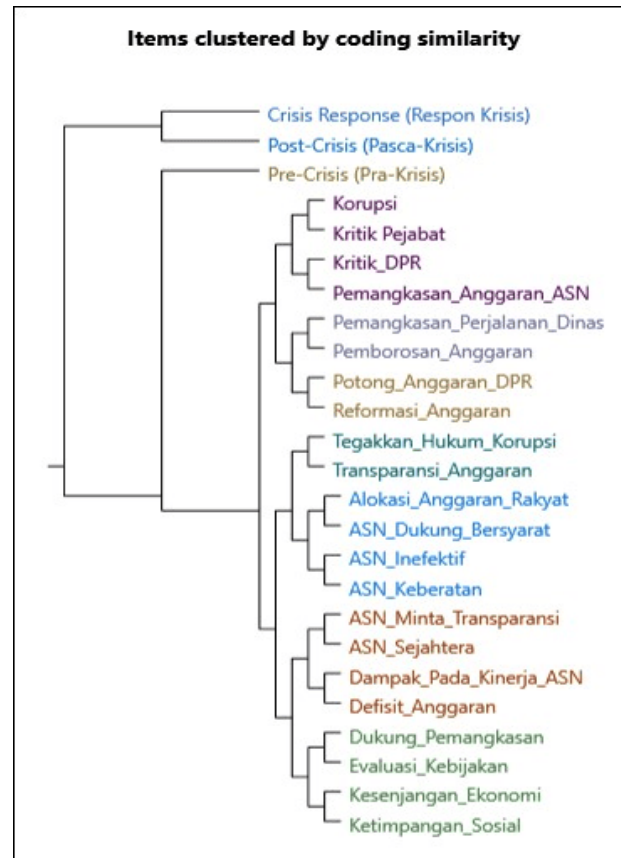
Item Clustered by Coding Similarity

Dalam analisis data kualitatif, Item Clustered by Coding Similarity digunakan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara kategori tematik (*nodes*) berdasarkan bagaimana data dikodekan. Fitur ini mengelompokkan tema-tema yang memiliki pola pengkodean yang serupa, sehingga dapat menemukan tema-tema utama yang sering muncul bersamaan dalam diskusi publik, serta bagaimana opini masyarakat berkembang dalam merespons kebijakan ini.

Tahap Pra-Crisis

Dalam perdebatan awal, sejumlah faktor sering muncul bersamaan, seperti “ASN Inefektif”, “ASN Sejahtera”, “Defisit Anggaran”, “Kesenjangan Ekonomi”, “Korupsi”, dan “Pemborosan Anggaran”. Keterkaitan antara “ASN Inefektif” dan “ASN Sejahtera” mencerminkan kritik publik terhadap ketimpangan antara anggaran besar bagi ASN dan rendahnya efektivitas kinerja mereka (Hadiyanto et al., 2022).

Sementara itu, keterkaitan “Defisit Anggaran” dengan “Kesenjangan Ekonomi” menunjukkan kekhawatiran bahwa pemotongan anggaran justru akan memperburuk kondisi ASN berpenghasilan rendah (Hidayat & Hardianto, 2022). Adapun pasangan “Korupsi” dan “Pemborosan Anggaran” menegaskan bahwa publik lebih melihat defisit fiskal sebagai akibat dari kebocoran dana publik, bukan semata besarnya belanja pegawai. Temuan ini menunjukkan bahwa sebelum kebijakan resmi diumumkan, wacana publik sudah sarat dengan kritik atas efektivitas birokrasi dan keadilan distribusi anggaran.



Gambar 7: Item Clustered by Coding Similarity

Tahap Crisis Response

Setelah kebijakan pemotongan anggaran ASN diumumkan, terjadi pergeseran dalam pola diskusi publik. Tema yang dominan mencakup “Dukung Pemangkasan”, “Kritik Pejabat”, “Kritik DPR”, “ASN Minta Transparansi”, dan “ASN Dukung Bersyarat”. Dukungan terhadap pemangkasan kerap disertai kritik terhadap pejabat dan DPR, mencerminkan tuntutan keadilan fiskal agar penghematan tidak hanya dibebankan pada ASN. Sementara itu, kombinasi “ASN Minta Transparansi” dan “ASN Dukung Bersyarat” menunjukkan bahwa ASN bersedia menerima kebijakan ini, asalkan disertai kejelasan implementasi dan perlindungan atas kesejahteraan mereka. Secara umum, diskusi publik berfokus pada keadilan, transparansi, dan perlakuan setara dalam kebijakan anggaran.

Tahap Post-Crisis

Setelah kebijakan pemotongan anggaran ASN diterapkan, fokus wacana publik bergeser ke isu “Evaluasi Kebijakan”, “Reformasi Anggaran”, “Ketimpangan Sosial”, dan “Tegakkan Hukum Korupsi”. Keterkaitan antara evaluasi dan reformasi anggaran menunjukkan harapan publik agar kebijakan ini benar-benar berdampak positif terhadap

keuangan negara. Sementara itu, kekhawatiran terhadap ketimpangan sosial yang dikaitkan dengan tuntutan pemberantasan korupsi menandakan bahwa publik menolak penghematan sepihak tanpa penegakan hukum yang adil. Perdebatan publik menyoroti pentingnya transparansi dan reformasi menyeluruh agar kebijakan pemotongan anggaran tidak memperburuk ketidakadilan, melainkan menjadi bagian dari solusi fiskal yang komprehensif.

Pembahasan

Kebijakan pemotongan anggaran ASN dalam konteks manajemen krisis fiskal merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menekan pengeluaran negara dan meningkatkan efisiensi keuangan. Namun, kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai pro dan kontra di masyarakat, terutama di kalangan ASN yang merasa bahwa pemangkasan ini berdampak pada kesejahteraan mereka. Melalui analisis data komentar YouTube dengan berbagai teknik seperti Word Frequency Query, Word Cloud, Tree Map, Cluster 3D, Matrix Coding Query, Project Map, Concept Map, dan Item Clustered by Coding Similarity, ditemukan bahwa wacana publik terkait kebijakan ini sangat kompleks dan mencerminkan berbagai perspektif.

Secara umum, terdapat dua kelompok utama dalam perdebatan ini. Kelompok pertama adalah mereka yang mendukung pemangkasan anggaran ASN dengan alasan bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan mengurangi pemborosan dalam birokrasi. Banyak komentar yang menyatakan bahwa ASN selama ini menikmati berbagai fasilitas seperti perjalanan dinas, seminar, dan tunjangan yang cukup besar dibandingkan dengan pekerja di sektor swasta. Oleh karena itu, pemangkasan anggaran dianggap sebagai tindakan yang wajar dan tidak akan terlalu berdampak pada kesejahteraan ASN secara keseluruhan. Selain itu, ada juga yang mengaitkan kebijakan ini dengan upaya pemerintah dalam mengurangi korupsi dan penyalahgunaan anggaran di sektor birokrasi. Di sisi lain, kelompok kedua adalah mereka yang menolak kebijakan pemotongan anggaran ASN karena dianggap akan menurunkan kesejahteraan pegawai negeri dan berpotensi mengganggu efektivitas layanan publik.

Dalam analisis Word Cloud dan Cluster 3D, ditemukan bahwa kata “ASN”, “menderita”, dan “gaji” sering muncul bersamaan, menunjukkan bahwa sebagian besar diskusi publik berpusat pada dampak finansial dari kebijakan ini terhadap kehidupan ASN. Banyak komentar yang menyatakan bahwa pemangkasan anggaran akan mengurangi tunjangan dan fasilitas kerja ASN, yang pada akhirnya dapat menurunkan motivasi dan produktivitas mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, terdapat juga kekhawatiran tentang dampak ekonomi yang lebih luas dari kebijakan ini. Beberapa komentar menyatakan bahwa pemotongan anggaran ASN tidak hanya akan berdampak pada kesejahteraan pegawai negeri, tetapi juga akan berpengaruh pada sektor ekonomi lain yang bergantung pada belanja pemerintah. Industri perhotelan, transportasi, dan penyedia layanan lainnya yang sering digunakan oleh ASN dalam kegiatan perjalanan dinas dan rapat kerja juga dapat mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya anggaran di sektor ini. Hal ini sesuai dengan penelitian [Astuti \(2020\)](#) yang menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran yang terlalu besar dapat mengganggu keberlangsungan sektor-sektor ekonomi tertentu yang sangat bergantung pada belanja negara.

Salah satu isu utama yang muncul dalam Matrix Coding Query adalah keadilan dalam distribusi pemotongan anggaran. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa pemangkasan

anggaran seharusnya tidak hanya diterapkan pada ASN, tetapi juga mencakup pejabat tinggi, anggota DPR, dan kementerian yang selama ini dinilai memiliki anggaran yang besar. Beberapa komentar bahkan menyoroti bahwa pemotongan anggaran ASN hanya akan efektif jika dilakukan secara merata di semua sektor pemerintahan, sehingga tidak hanya pegawai negeri yang merasakan dampaknya. [Santoso et al. \(2023\)](#) dalam penelitiannya menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran publik sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal. Jika masyarakat melihat bahwa kebijakan ini hanya menargetkan kelompok tertentu tanpa adanya pengurangan anggaran di sektor lain, maka kebijakan ini dapat menimbulkan resistensi yang lebih besar. Dalam konteks manajemen krisis, kebijakan pemotongan anggaran ASN menunjukkan pentingnya komunikasi publik yang efektif. [Mahfudz \(2025\)](#) menekankan bahwa dalam situasi krisis ekonomi, strategi komunikasi menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan penerimaan publik terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Hasil analisis Mind Map dan Project Map menunjukkan bahwa wacana publik terkait kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan efisiensi fiskal, tetapi juga mencerminkan kekhawatiran terhadap transparansi, keadilan, dan dampak sosial ekonomi dari kebijakan ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini dikomunikasikan dengan jelas kepada masyarakat, termasuk bagaimana mekanisme pemotongan anggaran ini dilakukan dan bagaimana dana yang dihemat akan dialokasikan kembali untuk kepentingan yang lebih besar. Salah satu strategi yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan menerapkan pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan, di mana ASN dan masyarakat umum dilibatkan dalam diskusi mengenai bagaimana kebijakan ini seharusnya diterapkan. Penelitian [Nirmalasari \(2020\)](#) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang didasarkan pada keterlibatan publik cenderung lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan kebijakan yang dibuat secara sepihak oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dapat menggunakan berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial dan forum diskusi publik, untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait implementasi kebijakan pemangkasan anggaran ini.

Selain itu, dari hasil analisis Item Clustered by Word Similarity dan Item Clustered by Coding Similarity, ditemukan bahwa ada dua pola utama dalam perdebatan ini: kelompok yang menghubungkan pemotongan anggaran ASN dengan efisiensi fiskal dan kelompok yang menghubungkannya dengan dampak negatif terhadap kesejahteraan ASN. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk memperjelas tujuan kebijakan ini agar tidak menimbulkan interpretasi yang beragam di masyarakat. Dari perspektif teori Public Choice Buchanan & Wagner (1977), pemerintah memang sering menghadapi dilema dalam alokasi anggaran, di mana kebijakan efisiensi fiskal harus seimbang dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial ([Kuehn, 2023](#)). Namun, jika kebijakan ini tidak diimplementasikan dengan adil dan transparan, maka akan muncul resistensi dari kelompok yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, pemerintah harus memastikan bahwa pemotongan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan tidak hanya menargetkan satu kelompok tertentu.

Temuan ini memberikan kontribusi penting secara teoritis terhadap pengembangan studi manajemen krisis. Dengan menggabungkan pendekatan analisis digital berbasis komentar YouTube dan kerangka manajemen krisis Coombs, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika opini publik digital dapat dimaknai sebagai refleksi dari tahapan krisis: pra-krisis (ketidakpuasan fiskal), respons krisis (reaksi terhadap kebijakan pemotongan), dan pasca-krisis (evaluasi kebijakan oleh publik). Konteks ini memperluas pemahaman teori manajemen krisis dengan menambahkan dimensi digital-partisipatif dalam pengelolaan kebijakan fiskal.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemotongan anggaran ASN merupakan isu yang kompleks dan memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, kebijakan ini harus diterapkan dengan perencanaan yang matang, transparansi yang tinggi, serta strategi komunikasi yang efektif agar dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan sosial yang lebih besar. Dengan adanya pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis data dalam perumusan kebijakan ini, diharapkan bahwa langkah-langkah efisiensi anggaran dapat berjalan dengan lebih optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan ASN maupun stabilitas ekonomi nasional.

Kebijakan pemotongan anggaran ASN berdampak signifikan bagi Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN, sehingga perlu direspons dengan strategi insentif berbasis kinerja, penguatan SDM, dan pelibatan publik untuk menjaga kualitas birokrasi dan layanan publik. Kalimantan Timur, sebagai daerah strategis nasional yang menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), kebijakan pemotongan anggaran ASN memiliki implikasi yang signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah dan stabilitas sosial-ekonomi lokal. Kalimantan Timur membutuhkan aparatur sipil negara yang tangguh, adaptif, dan termotivasi dalam mendukung transformasi birokrasi dan pengelolaan fiskal yang efisien. Oleh karena itu, kebijakan pemangkasan anggaran ASN harus memperhatikan keberlanjutan kualitas layanan publik di provinsi ini.

Secara praktis, hasil studi ini memberikan rekomendasi nyata bagi pembuat kebijakan, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menggunakan media sosial tidak hanya sebagai alat komunikasi satu arah, tetapi sebagai mekanisme partisipasi publik dalam merespons kebijakan yang sensitif. Komentar masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi kebijakan secara real-time. Selain itu, strategi komunikasi publik yang responsif dan berbasis data sangat penting agar kebijakan efisiensi fiskal tidak menimbulkan resistensi sosial yang berkepanjangan. Transparansi, keadilan dalam distribusi anggaran, serta pelibatan ASN dan masyarakat sipil dalam proses formulasi kebijakan adalah tiga pilar utama yang harus diperkuat. Dengan demikian, Kalimantan Timur dapat menjadi model provinsi yang tanggap terhadap kebijakan nasional namun tetap menjaga stabilitas birokrasi dan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah disampaikan diatas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Wacana pemotongan anggaran ASN memunculkan dua kelompok utama, yaitu pihak yang mendukung sebagai langkah efisiensi fiskal dan pihak yang menolak karena khawatir terhadap kesejahteraan ASN serta dampak pada layanan publik.
2. Publik juga menuntut agar pemangkasan dilakukan secara adil, tidak hanya kepada ASN tetapi juga pejabat tinggi dan DPR.
3. Analisis sentimen YouTube menunjukkan bahwa kebijakan fiskal perlu dikomunikasikan lebih transparan dan melibatkan publik untuk mencegah resistensi sosial.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka rekomendasi/implikasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi Transparan dan Partisipatif. Pemerintah perlu menyampaikan kebijakan pemangkasan anggaran secara terbuka dan melibatkan publik untuk mengurangi resistensi sosial.
2. Pemangkasan Anggaran yang Adil. Pemotongan tidak hanya berlaku untuk ASN, tetapi juga pejabat tinggi dan DPR agar tercipta keadilan fiskal.

3. Media Sosial sebagai Umpan Balik Kebijakan. Komentar publik di YouTube dapat dimanfaatkan sebagai alat evaluasi kebijakan secara real-time.
4. Penguatan Pengawasan dan Antikorupsi. Efisiensi anggaran harus disertai dengan upaya serius dalam mencegah kebocoran anggaran dan praktik korupsi.
5. Insentif ASN Berbasis Kinerja. Untuk menjaga motivasi ASN, perlu sistem insentif yang adil dan berbasis kinerja, bukan sekadar pemotongan.

Referensi

- Ashraf, N., Bandiera, O., Davenport, E., & Lee, S. S. (2020). Losing prosociality in the quest for talent? sorting, selection, and productivity in the delivery of public services†. *American Economic Review*, 110(5), 1355–1394. <https://doi.org/10.1257/aer.20180326>
- Astiti, N. P. (2020). Imbas covid-19, pemangkasan anggaran tidak bisa dihindari. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 5(2), 1–8.
- Bakhtiar, N., Suwandi, M., & Sari, N. R. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi Anggaran Publik Berdasarkan Prinsip Dalam Mencegah Praktik Korupsi. *Income Journal*, 2(1), 45–59. <https://income-journal.com/index.php/income/article/view/30/41>
- Calista, L. A., Riyandini, A., Windasari, P., & Amalin, K. (2024). McDonald's Indonesia Dalam Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat. *ANALOGI Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 58–70. <https://doi.org/10.61902/analogi.v2i2.1017>
- Cristòfol, F. J., Vela, J. de S. E., & Rojano, F. J. P. (2020). Active Listening in the Management of Crisis Communication: Case Study of the 2017 Terrorist Attack in Barcelona. *Communication & Society*, 33(4), 61–74. <https://doi.org/10.15581/003.33.4.61-74>
- Dewi, I. G. A. R. P., & Jayanti, L. G. P. S. E. (2021). Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu Pada Stress Kerja Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Reduksi Kualitas Audit. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 25–30. <https://doi.org/10.22225/kr.13.1.2021.25-30>
- Dwina, R. A., & Lexianingrum, S. R. P. (2024). Analisis Pro dan Kontra di Youtube Terhadap Pembangunan IKN di Kalimantan Timur Dalam Kaitan Komunikasi Politik. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(3), 370–378. <https://journal.csspublishing/index.php/ijm>
- Elliott, I. C. (2020). Organisational learning and change in a public sector context. *Teaching Public Administration*, 38(3), 270–283. <https://doi.org/10.1177/0144739420903783>
- Hadiyanto, Wulandari, S., Noor, M. A., Sitepu, C. B. B., & Ningtias, I. P. (2022). Bagaimana Pandemi Covid-19 Memengaruhi Pembagunan? Studi Belanja Pemerintah dan IPM di Indonesia Barat dan Timur. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(4), 301–316. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i4.703>
- Hadna, I. N. (2019). Strategi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menghadapi Kebijakan Pemangkasan Anggaran. *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan*, 7(2), 241. <https://doi.org/10.21043/libraria.v7i2.6507>
- Hidayat, A. R., & Hardianto, F. (2022). Lembaga Keuangan dan Kebijakan Publik Dalam Menangani Krisis Ekonomi Global. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10), 17710–17719. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13174>
- Irmayani, W. (2024). Persepsi Publik Terhadap Kenaikan PPN 12%: Pendekatan Sentimen Pada Komentar Youtube. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 12(2), 112–118. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khatulistiwa/article/view/24740/6737>

- Kuehn, D. (2023). James M. Buchanan as an urban economist. *Journal of Public Finance and Public Choice*, 38(1), 20–41. <https://doi.org/10.1332/251569121X16717078287437>
- Mahfudz, A. H. (2025). *Mengkaji Manajemen Krisis Di Indonesia*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=-IVKEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%22manajemen+krisis%22&ots=N5f9-1kPBI&sig=m9sSib2QUj-gzBWxtJ6GLnOSC_0
- Mansur, M. (2021). Manajemen Pengeluaran Daerah di Indonesia: Penanganan Krisis Kesehatan dan Ekonomi Selama Pandemi COVID-19. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 116. <https://doi.org/10.20961/sp.v16i2.54289>
- Misrun, C. A., Sains, F., Teknologi, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2023). Analisis Sentimen Komentar Youtube Terhadap Anies Baswedan Sebagai Bakal Calon Presiden 2024 Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier. *Jurnal Computer Science and Information Technology (CoSciTech)*, 4(1), 207–215. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.uin-suska.ac.id/72414/1/CHELYAULIA MISRUN.pdf?utm_source=chatgpt.com](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.uin-suska.ac.id/72414/1/CHELYAULIA%20MISRUN.pdf?utm_source=chatgpt.com)
- Nirmalasari, A. (2020). Crisis Management in Public Relations: Meta-Synthesis Analysis of Online Activism. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 24(2), 98–112. <https://doi.org/10.33299/jpkop.24.2.2446>
- Putra, A. S., Afrah Junita, & Iqlima Azhar. (2023). Systematic Literature Review: Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pegawai Skpk. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 169–177. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i1.97>
- Santoso, J., Hutapea, S. A., Fitri, L., & Kahir, S. (2023). Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Daerah. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 155–166. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4562>
- Sumartono, A., & Wahid, U. (2021). Manajemen Komunikasi Krisis Universitas XXY Menghadapi Pandemi COVID-19. *CARAKA : Indonesian Journal of Communications*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.25008/caraka.v2i1.52>
- Tarina, U., Febrian, M. R., Prihastuti, I. C., & Nurcahya, W. F. (2024). Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Negara Dalam Pemilihan Umum. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 785–797. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.885>
- Taufik Sugandi, M., Martanto, & Hayati, U. (2024). Analisis Sentimen Komentar Pengguna Youtube terhadap Kebijakan Baru Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Menggunakan Naïve Bayes. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 6(1), 218–227. https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/JINRPL/article/view/10301?utm_source=chatgpt.com
- Turnip, H., & Soewondo, P. (2022). Analisis Manajemen Anggaran Pada Rumah Sakit Rujukan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 7(2), 124. <https://doi.org/10.7454/eki.v7i2.5993>
- Wijayanti, A., & Rahmawati, A. (2020). *Pengaruh Kejelasan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial ASN dengan Servant Leadership Sebagai Variabel Moderating*. 2507(February), 1–9. <https://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/29/27>
- Yaşar Dinçer, F. C., Yirmibeşoğlu, G., Narin, M., & Saraç, F. E. (2024). Crisis Management and

Sustainability in Tourism Industry: Obstacles and Recovery Strategies after the COVID-19 Crisis in Antalya, Türkiye. *Sustainability*, 16(12), 5121. <https://doi.org/10.3390/su16125121>

Zainuri, Z., Lutfhi, A., Saleh, M., Aisyah, S., & Fathorrazi, M. (2022). Analisis Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur Pasca Krisis Global Tahun 2008. *Eksansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 14(2), 103–115. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.3998>